



# **Rancangan Akhir Renstra Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2026**



**Kota Pekalongan**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Restra) Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Restra) Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen Perencanaan dan Pedoman bagi Dinas Perhubungan Kota Pekalongan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang memuat Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekalongan sebagai *Leading Sector* dalam Pengambilan Kebijakan Urusan Perhubungan di Kota Pekalongan. Dokumen ini disusun dengan memperhatikan pada RPJM Daerah dan Prioritas Program Pembangunan Daerah dalam periode 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan Terpilih periode 2021-2026.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dilingkungan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan yang telah bekerja keras dalam penyusunan dokumen Renstra ini sehingga dapat menyelesaikannya dengan baik.

Harapan kami, semoga dokumen Renstra ini dapat memberikan gambaran pelaksanaan tugas pelayanan publik Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dalam rangka meminimalisasikan permasalahan dengan berbagai solusi yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dan Pemerintah Kota Pekalongan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Pekalongan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan bimbingan dan kekuatan kepada kita dalam melaksanakan tugas yang mulia ini.

Pekalongan, September 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA PEKALONGAN



**Drs. SLAMET PRIHANTONO, MM**

Pembina/Utama Muda/ (IV/c)

NIP. 19620413 198503 1 010

# DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-6
1.4 Sistematika Penulisan .....	I-7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-13
2.2.1. Sumber Daya Manusia .....	II-13
2.2.2. Sumber Daya Lainnya .....	II-15
2.3. Kinerja Layanan Perangkat Daerah .....	II-18
2.4. Tantangan dan Peluang .....	II-33
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKALONGAN .....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan .....	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih .....	III-2
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah .....	III-6
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	III-8
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	III-10
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.....	IV-1

4.4.1. Kondisi Demografi .....	IV-2
4.4.2. Kondisi Ekonomi .....	IV-2
4.2. Data Transportasi Jalan .....	IV-2
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>V-1</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	
<b>VI-1</b>	
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	
<b>PERHUBUNGAN .....</b>	<b>VII-1</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>VIII-1</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 1.1** Keterkaitan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dengan RPJMD, Renstra Provinsi, Renstra K/L dan KLHS ..... I-2

**Gambar 2.1** Dinas Perhubungan Kota Pekalongan ..... II-3

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Karyawan berdasar Status Kepegawaiannya .....	II-13
Tabel 2.3 Jumlah Karyawan berdasar Tingkat Pendidikan.....	II-14
Tabel 2.4 Jumlah Karyawan berdasar Jenis Kelamin .....	II-14
Tabel 2.5 Jumlah Karyawan berdasar Jenis Kelamin .....	II-15
Tabel 2.6 Data Inventarisasi Barang s/d 31 Desember 2020 .....	II-15
Tabel 2.7 Jumlah Fasilitas LLAJ s/d Tahun 2021 .....	II-17
Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.... II-21	
Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan .....	II-30
Tabel 2.10 Tantangan dan Peluang Dinas Perhubungan Kota Pekalongan ....	II-35
Tabel 3.1 Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan .....	III-6
Tabel 3.2 Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah .....	III-8
Tabel 3.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Dinas Perhubungan Kota Pekalongan .... III-9	
Tabel 3.4 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dinas Perhubungan Kota Pekalongan .....	III-9
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan .....	IV-1
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	V-2

# BAB I | PENDAHULUAN

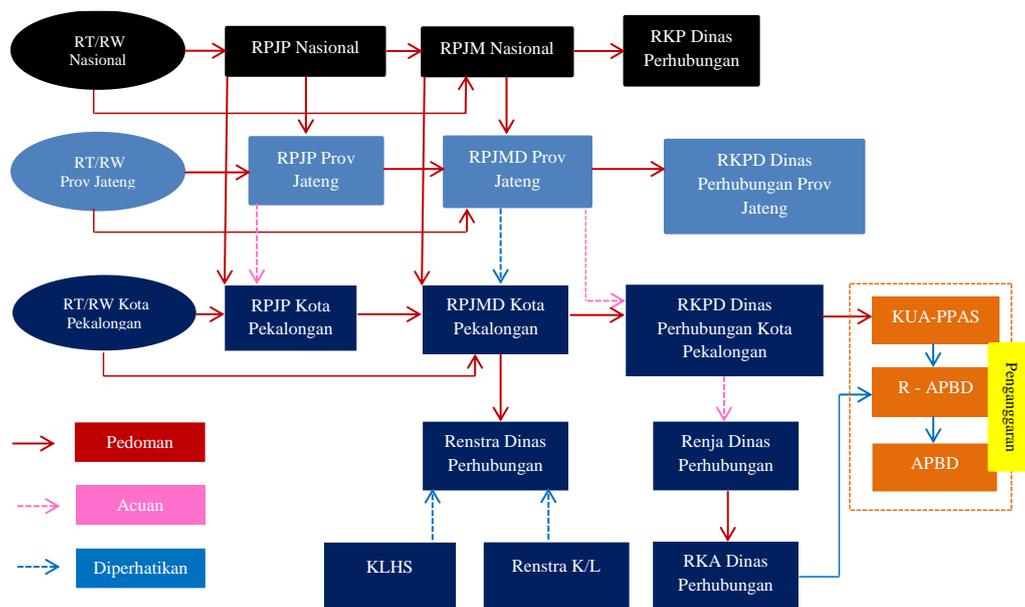
## 1.1 Latar Belakang

---

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya guna menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), menengah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, maka Dinas Perhubungan (Dinhub) Kota Pekalongan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus pula menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bentuk penjabaran dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Penyusunan Renstra disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian Perhubungan, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah serta Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).



**Gambar 1.1** Keterkaitan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dengan RPJMD, Renstra Provinsi, Renstra K/L dan KLHS

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintah pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat Indikatif.

Penyusunan Renstra SKPD Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Selain hal tersebut Rencana Strategis SKPD ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program dan kegiatan dalam rangka mendukung mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Pekalongan yaitu *“Mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”*

Dalam rangka penyusunan renstra perangkat daerah, Dinas Perhubungan telah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA Kota Pekalongan, dan pemangku kepentingan, yang disusun melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Forum LLAJ, perumusan rancangan akhir serta penetapan Renstra Perhubungan 2021-2026.

## **1.2 Landasan Hukum**

---

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
22. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
23. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
24. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

---

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pekalongan adalah :

1. Menjadikan pedoman dalam merencanakan dan merumuskan rencana kerja dan Program serta Kegiatan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekalongan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2021-2026;
2. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pekalongan adalah :

1. Merumuskan gambaran umum pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan yang akan diselenggarakan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan sebagai penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan terpilih;

2. Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan lima tahunan secara efektif dan efisien serta mempertajam prioritas pembangunan seiring dengan kebutuhan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal;
3. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

---

Sistematika penyusunan dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika Penulisan Sebagai Berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian renstra Dinas Perhubungan, Fungsi Renstra Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Perhubungan, keterkaitan Renstra Dinas Perhubungan dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah dengan Renja Dinas Perhubungan.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Dalam sub bab ini memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Perhubungan , serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Dalam sub bab ini memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Di dalam sub bab ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Perhubungan, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN**

### **2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Didalam sub bab ini memuat penjelasan tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, uraian tugas dan fungsi eselon di Dinas Perhubungan, jumlah personil dan tata laksana Dinas Perhubungan.

### **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Didalam sub bab ini memuat penjelasan ringkasa tentang Sumber Daya yang dimiliki Dinas Perhubungan baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya lainnya.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada sub bab ini menerangkan secara ringkas tingkat capaian Kinerja Dinas Perhubungan terhadap Renstra periode sebelumnya, menurut urusan wajib, indikator kinerja pelayanan daerah dan indikator lainnyayang telah diratifikasi oleh pemerintah.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Di sub bab ini menjelaskan tentang tantangan dan peluang yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

# **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN**

## **3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan terpilih.**

pada bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekalongan yang terkait dengan visi, misi serta program kerja Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan. Dipaparkan juga faktor-faktor penghambat dan pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan yang dapat mempengaruhi visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan

## **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.**

Pada sub bab ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan Dinas Perhubungan ditinjau dari sasaran jangka menengah Kementerian Perhubungan ataupun Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pada sub bab ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan Dinas Perhubungan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Pada bagian ini berisi *review* faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Dinas Perhubungan;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Perhubungan;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN**

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada Bab ini dikemukakan Rencana Program, kegiatan dan Sub Kegiatan serta pendanaan indikatif 5 (lima) tahun mendatang.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang.

## **BAB VIII PENUTUP**

# BAB II | GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

## 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

---

Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Dinas Perhubungan Kota Pekalongan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang Perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pekalongan melalui Sekretaris Daerah. tugas pokok Dinas Perhubungan adalah membantu Walikota dalam unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan. serta mempunyai fungsi:

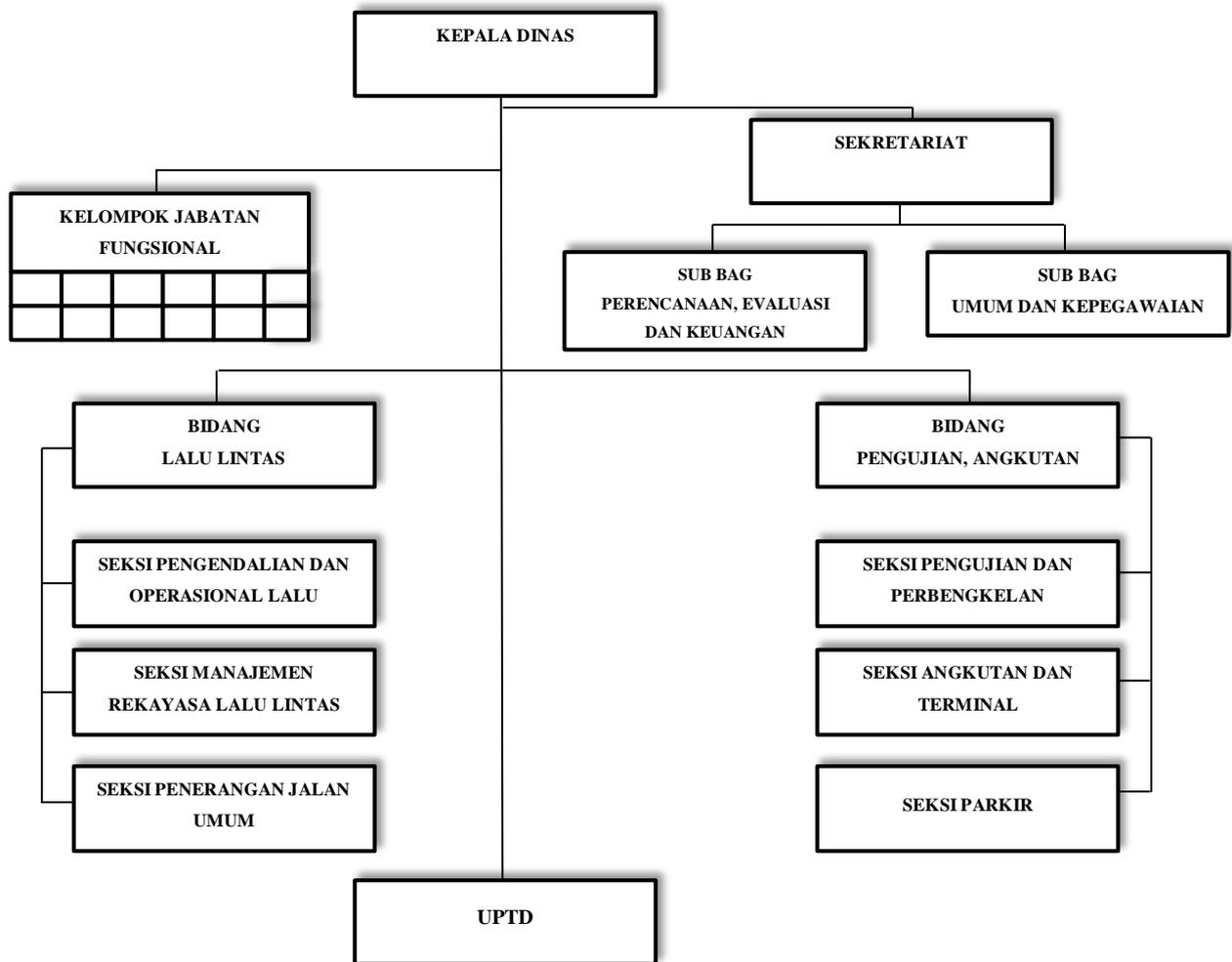
1. Perumusan dan penetapan sasaran, program bidang perhubungan;
2. Perumusan kebijakan bidang Perhubungan;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang lalu lintas;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang Pengujian, Angkutan dan Parkir;
5. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang Kesekretariatan;
6. Pengarahan dan Pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
7. Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekalongan terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat
  - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
  - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Lalu Lintas
  - a. Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas;
  - b. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas; dan
  - c. Seksi Penerangan Jalan Umum.
4. Bidang Pengujian, Angkutan dan Parkir
  - a. Seksi Pengujian dan Perbengkelan;
  - b. Seksi Angkutan dan Terminal; dan
  - c. Seksi Parkir
5. UPTD; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :

**Bagan Struktur Organisasi  
Dinas Perhubungan Kota Pekalongan**



**Gambar 2.1** Dinas Perhubungan Kota Pekalongan

Sebagaimana Gambar di atas, masing-masing unsur dari organisasi Dinas Perhubungan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian,

pengoordinasian rencana program, kegiatan anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- perumusan sasaran, program dan kegiatan dinas;
- pengoordinasian penyusunan kebijakan dinas;
- pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
- pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
- pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi kctatalaksanaan,
- ketatausahaan, kepegawaian, kehurnasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
- pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP);
- pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
- pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas kesehariannya, Sekretariat dibantu oleh 2 (dua) subbagian yaitu subbagian Umum dan Kepegawaian dan subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- melaksanakan kegiatan tata kelola barang milik daerah meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan barang milik daerah;
- melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;
- menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- pengelolaan menyusun Laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); dan
- mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas:

- menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;
- menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran;
- menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaporan capaian kinerja;
- melaksanakan verifikasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;
- melaksanakan fungsi akuntansi;
- menyusun bahan dan mengoordinasikan Laporan keuangan;
- menyusun bahan profil perangkat daerah;
- mengelola data dan informasi;
- menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP); dan
- mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

## 2. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas, penerangan jalan umum, pengendalian dan operasional lalu lintas. Sedangkan fungsi Bidang Lalu Lintas adalah :

- perumusan program kerja bidang lalu lintas;
- perumusan bahan kebijakan bidang lalu lintas;

- penyelenggaraan proses pemberian rekomendasi pelayanan umum di bidang lalu lintas;
- pengoordinasian pengendalian dan ketertiban lalu lintas;
- penyelenggaraan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang lalu lintas;
- pengoordinasian dan penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas;
- penyelenggaraan pembinaan bidang lalu lintas;
- pengoordinasian pengadaan, pengaturan, pemasangan, pengawasan, rehabilitasi dan pemeliharaan lampu penerangan jalan di ruas jalan kota;
- perencanaan dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas, Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Seksi Penerangan Jalan Umum.

a. Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas

Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas mempunyai tugas:

- menyusun rencana kegiatan bidang pengendalian operasional lalu lintas;
- menyusun bahan kebijakan bidang pengendalian operasional lalu lintas;

- melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan raya;
- melaksanakan kegiatan pengamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- melaksanakan kegiatan operasi laik jalan kendaraan bermotor;
- melaksanakan penegakan hukum pengendalian operasional lalu lintas;
- melaksanakan kegiatan operasional perlintasan sebidang;
- melaksanakan pembinaan pengendalian operasional lalulintas;
- melaksanakan pemberdayaan sumber daya manusia bidang lalu lintas;
- menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

b. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.

Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas:

- menyusun rencana kegiatan bidang manajemen rekayasa lalu lintas;
- menyusun bahan kebijakan bidang manajemen rekayasa lalu lintas;
- melaksanakan penerapan manajemen dan rekayasa lalu-lintas;
- melaksanakan pengaturan penggunaan jalan;
- melaksanakan pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas;

- melaksanakan kegiatan operasional Area Traffic Control System (ATCS);
- melaksanakan kegiatan analisis dampak lalu lintas (andalalin) untuk jalan kota;
- melaksanakan forum lalu lintas dan angkutan jalan;
- melaksanakan pembinaan manajemen rekayasa lalu lintas;
- menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

### 3. Seksi Penerangan Jalan Umum

Seksi Penerangan Jalan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.

Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas:

- menyusun rencana kegiatan bidang penerangan jalan umum;
- menyusun bahan kebijakan bidang penerangan jalan umum di ruas jalan kota;
- menyusun rencana pengadaan, pengaturan, pemasangan, pengawasan, rehabilitasi dan pemeliharaan penerangan jalan umum di ruas jalan kota;
- melaksanakan kegiatan pengadaan, pengaturan dan pemasangan penerangan jalan umum di ruas jalan kota;
- melaksanakan kegiatan pengawasan, rehabilitasi dan pemeliharaan penerangan jalan umum di ruas jalan kota;
- melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan operasional penerangan jalan umum;
- melaksanakan pemeliharaan peralatan operasional penerangan jalan umum;
- melaksanakan pembinaan bidang penerangan jalan umum;

- menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

#### 4. Bidang Pengujian, Angkutan dan Parkir

Bidang Pengujian, Angkutan dan Parkir dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengujian, Angkutan dan Parkir mempunyai tugas menyelenggarakan pengujian dan perbengkelan, angkutan dan terminal serta parkir.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengujian, Angkutan dan Parkir menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan program kerja bidang pengujian dan perbengkelan, angkutan dan terminal serta parkir;
- Perumusan bahan kebijakan bidang pengujian dan perbengkelan, angkutan dan terminal serta parkir;
- Penyelenggaraan pelaksanaan proses pemberian rekomendasi dan pelayanan umum pengujian kendaraan bermotor;
- pengoordinasian pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor wajib uji serta pengujian kendaraan bermotor;
- penyelenggaraan pembinaan bidang pengujian, angkutan dan parkir;
- pengoordinasian penyelenggaraan proses pemberian rekomendasi ijin trayek angkutan orang, ijin usaha angkutan orang dan barang serta angkutan tidak bermotor;
- penyelenggaraan pengelolaan dan pemeliharaan terminal;
- pengendalian dan pengelolaan parkir;
- perencanaan dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan

- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengujian dan Angkutan membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Pengujian dan Perbengkelan, Seksi Angkutan dan Terminal, dan Seksi Parkir.

a. Seksi Pengujian dan Perbengkelan

Seksi Pengujian dan Perbengkelan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengujian, Angkutan dan Parkir, Seksi Pengujian dan Perbengkelan mempunyai tugas:

- menyusun rencana kegiatan bidang pengujian kendaraan bermotor dan perbengkelan;
- menyusun bahan kebijakan bidang pengujian kendaraan bermotor dan perbengkelan;
- melaksanakan koordinasi kegiatan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor wajib uji, pengujian kendaraan bermotor dan perbengkelan;
- melaksanakan kegiatan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor wajib uji, pengujian kendaraan bermotor dan perbengkelan;
- melaksanakan pembinaan dan penyuluhan teknik pengujian kendaraan bermotor;
- melaksanakan pembinaan pengujian kendaraan bermotor dan perbengkelan;
- melaksanakan pemberian bimbingan dan pembinaan teknis perbengkelan;
- menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

b. Seksi Angkutan dan Terminal

Seksi Angkutan dan Terminal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengujian, Angkutan dan Parkir. Seksi Angkutan dan Terminal mempunyai tugas:

- menyusun rencana kegiatan bidang angkutan dan terminal;
- menyusun bahan kebijakan bidang angkutan dan terminal;
- melaksanakan pembinaan angkutan orang, barang dan kendaraan tidak bermotor ;
- melaksanakan proses pemberian rekomendasi ijin trayek angkutan orang, ijin usaha angkutan orang dan barang serta angkutan tidak bermotor;
- melaksanakan pengelolaan, perneliharaan dan penertiban terminal;
- melaksanakan pengelolaan pengembangan terminal dan penarikan retribusi terminal;
- menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

c. Seksi Parkir

Seksi Parkir dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengujian, Angkutan dan Parkir. Seksi Parkir dan Keselamatan Perhubungan mempunyai tugas:

- Menyusun rencana kegiatan bidang parkir;
- Menyusun bahan kebijakan bidang parkir;
- Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan bidang parkir;
- Melaksanakan pengendalian pengelolaan parkir;
- Melaksanakan pengelolaan retribusi parkir;

- Melaksanakan kajian potensi parkir;
- Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Pekalongan terdiri dari Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya seperti peralatan/ perlengkapan/ asset.

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia**

Jumlah Karyawan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan sampai dengan 31 Agustus 2021, tercatat sebanyak 148 orang. Keadaan Karyawan berdasarkan Status Kepegawaiannya, pendidikan, jenis kelamin dan golongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

#### **1. Jumlah Karyawan berdasar Status Kepegawaiannya**

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Karyawan berdasar Status Kepegawaiannya**

No	Nama OPD	Status Karyawan				Jumlah
		PNS	CPNS	Tenaga Kontrak	Tenaga Kegiatan	
1.	Dinas Perhubungan	39	7	7	95	148

Berdasarkan Tabel 2.2.1.1 diatas, diperoleh gambaran bahwa Jumlah karyawan dengan status tenaga kontrak lebih mendominasi, yaitu sebesar 64,18% dari total Karyawan yang ada di Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.

## 2. Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikannya

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Karyawan berdasar Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Doktor (S-3)	0
2	Pasca Sarjana (S-2)	2
3	Sarjana Strata 1 (S-1)	38
4	Diploma IV (D-IV)	8
5	Diploma III (D-III)	18
6	Diploma II (D-II)	5
7	SLTA	73
8	SLTP	1
9	SD	3
<b>Jumlah</b>		<b>148</b>

Berdasarkan Tabel 2.2.1.2 diatas, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan Karyawan di Dinas Perhubungan didominasi tingkat Sarjana Strata 1 (S-1) yaitu sebesar 25,67% dari total Karyawan yang ada di Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.

## 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Karyawan berdasar Jenis Kelamin**

No	OPD	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Dinas Perhubungan	125	23	148

Berdasarkan Tabel 2.2.1.3 diatas, diperoleh gambaran bahwa Jumlah Karyawan Laki-laki lebih banyak, yaitu sebesar

84,45 % dari total Karyawan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.

#### 4. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Kepangkatan

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Karyawan berdasar Jenis Kelamin**

No	OPD	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Dinas Perhubungan	2	30	13	1	46

Berdasarkan Tabel 2.2.1.4 diatas, diperoleh gambaran bahwa Jumlah PNS Golongan III lebih mendominasi, yaitu sebesar 65,21 % dari total PNS yang ada di Dinhub Kota Pekalongan.

#### 2.2.2. Sumber Daya Lainnya

**Tabel 2.5**  
**Data Inventarisasi Barang s/d 31 Desember 2020**

Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)
	<b>ASET TETAP</b>		
<b>1</b>	<b>TANAH</b>	<b>9</b>	<b>5.801.134.762,00</b>
01.01	Tanah	9	5.801.134.762,00
<b>2</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>2.140</b>	<b>25.612.066.475,66</b>
02.01	Alat Besar	9	1.703.363.400,00
02.02	Alat Angkutan	28	1.697.549.344,60
02.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	49	1.921.357.175,00
02.04	Alat Pertanian	3	7.400.000,00
02.05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.159	3.186.368.499,06
02.06	Alat Studio, Komunikasi Dan	79	510.301.689,00

<b>Kode Barang</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
	Pemancaran		
02.07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	0	0
02.08	Alat Laboratorium	8	25.950.000,00
02.09	Alat Persenjataan	1	900.000,00
02.10	Komputer	114	1.225.330.210,00
02.11	Alat Eksplorasi	4	29.419.700,00
02.12	Alat Pengeboran	0	0
02.13	Alat Produksi, Pengolahan Dan	0	0
02.14	Alat Bantu Eksplorasi	0	0
02.15	Alat Keselamatan Kerja	4	18.000.000,00
02.16	Alat Peraga	0	0
02.17	Peralatan Proses/Produksi	0	0
02.18	Rambu - Rambu	680	15.278.226.458,00
02.19	Peralatan Olah Raga	2	7.900.000,00
<b>3</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>27</b>	<b>10.707.462.335,00</b>
03.01	Bangunan Gedung	26	10.653.170.235,00
03.02	Monumen	0	0
03.03	Bangunan Menara	1	54.292.100,00
03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	0
<b>4</b>	<b>JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI</b>	<b>6</b>	<b>21.687.000,00</b>
04.01	Jalan Dan Jembatan	0	0
04.02	Bangunan Air	2	5.800.000,00
04.03	Instalasi	0	0
04.04	Jaringan	4	15.887.000,00
<b>5</b>	<b>ASET TETAP LAINYA</b>	<b>102</b>	<b>9.092.500,00</b>
05.01	Bahan Perpustakaan	99	8.900.000,00
05.02	Barang Bercorak	3	192.500,00

<b>Kode Barang</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
	Kesenian/Kebudayaan/Olahraga		
05.03	HEWAN	0	0
05.04	BIOTA PERAIRAN	0	0
05.05	TANAMAN	0	0
05.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0
05.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0
<b>6</b>	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
<b>TOTAL ASET TETAP</b>		<b>2.284</b>	<b>42.151.443.072,66</b>

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Fasilitas LLAJ s/d Tahun 2021**

<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Truck Crane	3	1 unit skylift perbaikan Traffic Light, 2 unit skylift perbaikan PJU
2.	Mobil Patroli roda 4	3	
3.	Motor Patroli roda 2	4	
4.	Bus Sekolah	1	Hibah dari Kementerian Perhubungan
5.	Mobil Pick up	2	
6.	Traffic Light	27	15 Simpang ATCS, 12 Simpang belum terkoordinasi

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
7.	Warning Lamp	40	
8.	Barikade Lalu Lintas	479	
9.	Water Barrier	113	
10.	Rambu Lalu Lintas	554	
11.	Cermin Tikungan	49	
12.	Lampu Penerangan Jalan Umum	13.423	5.849 titik termeterisasi, 7.574 titik belum termeterisasi
13.	Alat Uji Kendaraan Bermotor	23	
14.	Halte	14	
15.	Guardrail	10	
<b>TOTAL</b>		<b>14.475</b>	

### 2.3. Kinerja Layanan Perangkat Daerah

Keberhasilan Perkembangan dan Pembangunan suatu daerah/kota tidak terlepas dari kondisi transportasinya, karena menyangkut kelancaran distribusi orang dan barang serta jasa. Semakin banyak orang melakukan mobilitas dengan kendaraan bermotor menunjukkan semakin banyaknya aktivitas yang ada dalam suatu daerah tersebut memperlihatkan peningkatan perputaran perekonomian yang baik, disamping juga banyak tumbuh kembangnya aktifitas pembangunan dan perdagangan.

Sebagai kota sedang, Kota Pekalongan tumbuh menjadi pusat kegiatan di wilayah PETANGLONG (Pekalongan, Batang dan Kabupaten Pekalongan). Selain itu, Kota Pekalongan juga menjadi tujuan untuk melakukan kegiatan ekonomi dan perdagangan dan jasa, baik dari dalam Kota Pekalongan ataupun wilayah sekitarnya yang menjadikan Kota Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Melihat kondisi ini, Kota Pekalongan merupakan salah satu simpul distribusi perekonomian yang harus terjaga kondisi transportasinya, hal ini menuntut kesiapan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan yang dalam

hal ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekalongan untuk merencanakan dan menyiapkan sumber daya baik fasilitas sarana dan prasarana maupun Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat mengendalikan dan meningkatkan transportasi di kota Pekalongan, sehingga diharapkan kondisi transportasi di Kota Pekalongan dapat menjadi lebih baik.

Pembangunan sektor transportasi adalah sebuah prioritas, karena dapat menggerakkan berbagai potensi daerah dan meningkatkan aksesibilitas antar wilayah untuk pemerataan pembangunan perekonomian suatu daerah. Transportasi juga dapat menjadi suatu potensi bagi Kota Pekalongan untuk bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sekitar dan Instansi lainnya guna penanganan transportasi darat, laut dan jalan rel.

Adapun upaya Pemerintah Kota Pekalongan untuk menata sistem transportasi yang telah dilakukan secara rutin antara lain penyediaan sarana prasarana/perlengkapan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, *traffic light* yang terkoordinasi *Area Traffic Control System* (ATCS) dan lampu penerangan jalan umum, pelaksanaan koordinasi antar pemangku kebijakan/*Stakeholders* berkaitan dengan lalu lintas yang terhimpun dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk evaluasi terhadap penyelenggaraan transportasi baik itu lalu lintas maupun angkutan umum, penertiban yang disertai dengan penegakan hukum terhadap pengguna jalan dan kendaraan angkutan umum.

Terkait dengan kondisi prasarana jalan, pengecatan marka jalan tiap tahunnya rata-rata sebesar 7000 m<sup>2</sup>, dan pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di lokasi sekolah yang dirasa kepadatan lalu lintasnya tinggi, hal tersebut menunjang perwujudan Kota Pekalongan menjadi Kota Layak Anak dan diharapkan akan terciptanya peningkatan kedisiplinan masyarakat dan peningkatan keselamatan di jalan. Pemenuhan rambu lalu lintas baik itu Rambu Larangan, Perintah, Petunjuk, Peringatan maupun pemasangan *guardrail* di titik-titik yang berbatasan dengan sungai maupun persawahan, serta perubahan Traffic Light dari yang belum terkoordinasi menjadi

terkoordinasi dengan ATCS untuk mengurangi dampak kemacetan di jalan protokol Kota Pekalongan.

Pelaksanaan penjagaan terhadap perlintasan sebidang jalan di Kota Pekalongan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, sejak tahun 2010 telah dijaga sehingga penurunan angka kecelakaan pada perlintasan sebidang jalan mendekati angka *zero*. Kegiatan pengamanan perlintasan Kereta Api di 4 lokasi penjagaan dengan jumlah petugas jaga lintasan sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang dan seluruhnya sudah mengikuti Diklat Petugas Jaga Lintasan (PJJ), dan memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. Sistem pengamanan yang hanya mengandalkan komunikasi menggunakan frekuensi radio sangat rentan terhadap kemungkinan *trouble* atau gangguan informasi perjalanan kereta api sehingga perlu untuk dilakukan perbaikan dan perancangan sistem pengamanan perlintasan yang lebih baik. Selain jaringan jalan, Kota Pekalongan juga memiliki stasiun kereta api yang melayani pengangkutan penumpang dan barang lintas utara (Jakarta-Cirebon-Tegal-Pekalongan-Semarang-Surabaya). Berdasarkan kelasnya, Stasiun Pekalongan termasuk dalam kategori stasiun Besar.

Prestasi yang telah dicapai oleh Kota Pekalongan di bidang Perhubungan adalah penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha untuk kategori lalu lintas pada tahun 2014, 2015 dan 2019. Penghargaan Wahana Tata Nugraha adalah penghargaan terhadap Pemerintah Daerah atas kemampuan dan peran serta masyarakatnya dalam peningkatan penyelenggaraan kinerja sistem transportasi perkotaan untuk terciptanya sistem lalu lintas dan angkutan kota yang tertib, lancar, selamat, aman, efisien dan berkelanjutan.

Gambaran kinerja Dinas Perhubungan lima tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

**Tabel 2.7**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan**  
**Kota Pekalongan**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Renstra (Sesuai Perub RPJMD 2016-2021)	Target Kinerja			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian terhadap Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Urusan Perhubungan</b>											
1	Persentase peningkatan fasilitas LLAJ	%	-	79,43	89,72	89,72	95,41	97,08	97,08	100	Akan Tercapai
-	Jumlah Rambu yang terpasang	buah				20		20			
-	Jumlah warning light yang terpasang	unit				4		4			
-	Jumlah panjang pengecatan Marka Jalan	meter				7750		7750			
-	Jumlah simpang Traffic Light yang dilakukan Reinstalasi dan Penggantian Lampu	simpang				1		1			
-	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan instalasi dan rambu-rambu lalu lintas	bulan				12		12			

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Renstra (Sesuai Perub RPJMD 2016-2021)	Target Kinerja			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian terhadap Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Jumlah sumur bor yang diadakan	unit				2		2			
	- Jumlah kanopi yang diadakan	unit				2		2			
2	Ketersediaan angkutan umum	%	-	19,90	20,03	18,84	17,97	22,69	22,69	20,95	Tercapai
3	Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan uji berkala	%	-	92,22	92,34	92,34	84,52	83,21	83,21	92,4	Akan Tercapai
	- Jumlah juru mudi / sopir yang difasilitasi dan diberikan pembinaan	Orang				73					
	- jumlah tempat pemberhentian angkutan umum (halte) yang terawat, bersih, nyaman dan menarik bagi pengguna	unit				5					
	- Jumlah kegiatan pemilihan sopir/ awak kendaraan angkutan umum teladan	Kegiatan				1					
	- Jumlah kegiatan pengamanan Lebaran, Natal, tahun Baru dan pengamanan	kegiatan				4		4			

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Renstra (Sesuai Perub RPJMD 2016-2021)	Target Kinerja			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian terhadap Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	penanggulangan Covid-19 yang dilaksanakan										
-	Jumlah pengemudi becak yang difasilitasi dan diberikan pembinaan	Orang				250					
-	Jumlah bulan pemeliharaan dan kalibrasi alat uji	bulan				12		12			
-	Jumlah sarana alat uji yang diadakan	unit				5					
-	Jumlah kunjungan ke usaha perbengkelan dan bina karya dalam rangka keselamatan kerja mau pun keselamatan jalan bagi pengguna jasa bengkel	kunjungan				25		25			
-	Jumlah kunjungan tertib administrasi perizinan untuk mendukung keselamatan jalan	Kunjungan				4		4			

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Renstra (Sesuai Perub RPJMD 2016-2021)	Target Kinerja			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian terhadap Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	Jumlah usaha angkutan umum yang dibina	perusahaan				20		20			
	Persentase peningkatan kasawan tertib lalulintas (KTL)	%	-	77,78	88,89	88,89	100	100	100	100	Tercapai
-	Jumlah pengawalan yang dilaksanakan	kali				26		10			
-	Jumlah kegiatan pengamanan yang dilaksanakan	kegiatan				54		54			
-	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan parkir yang dilaksanakan	kali				24		180			
-	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	kali				1		0			
-	Jumlah penyelenggaraan rapat Andalalin	kali				6		6			
-	Jumlah dokumen survey lalu lintas yang disusun	dokumen				1		1			
-	Jumlah bulan Operasional dan	Bulan				12		12			

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Renstra (Sesuai Perub RPJMD 2016-2021)	Target Kinerja			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian terhadap Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan perlintasan sebidang										
-	Jumlah bulan Operasional dan Pemeliharaan ATCS	Bulan				12		12			
-	Jumlah bulan kegiatan penindakan dan penegakan hukum terhadap kendaraan wajib uji terkait persyaratan teknis dan laik jalan	Bulan				9		9			
-	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Forum LLAJ	Kegiatan				4		4			
<b>Urusan Rutin</b>											
1	Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan makan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi	%	0	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
-	Jumlah bulan penyediaan jasa surat	bulan				12		12			

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Renstra (Sesuai Perub RPJMD 2016-2021)	Target Kinerja			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian terhadap Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	menyurat										
	- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	bulan				12	12				
	- Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan				12	12				
	- jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	bulan				12	12				
	- jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	bulan				12	12				
	- Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan				12	12				
	- Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan				12	12				

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Renstra (Sesuai Perub RPJMD 2016-2021)	Target Kinerja			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian terhadap Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	bulan				12	12				
	- jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	bulan				12	12				
	- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan				11	11				
	- Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	org/kali				189	83				
	- Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan	bulan				12	12				
2	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan	%	0	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Renstra (Sesuai Perub RPJMD 2016-2021)	Target Kinerja			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian terhadap Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	peralatan kantor dan rumah tangga										
	- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala	unit				1	1				
	- Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara secara rutin/ berkala	unit				30	60				
	- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	unit				19	19				
	- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala	unit				45	45				
3	Persentase kehadiran aparatur	%	0	90	90	90	100	90	100	100	Tercapai
	- Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	stel				120	120				
4	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	0	100	5	100	100	100	100	100	Tercapai

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Renstra (Sesuai Perub RPJMD 2016-2021)	Target Kinerja			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian terhadap Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	Jumlah dokumen renja yang disusun	dokumen				2	2				
-	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	dokumen				4	4				
-	Jumlah dokumen Sakip yang disusun	dokumen				2	2				
-	Jumlah laporan keuangan OPD yang disusun	dokumen				1	1				
-	Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang disusun	dokumen				1					
-	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	bulan				12	12				
5	Pengaduan yang diterima	kasus	-	-	0	0	0	-	0	0	Tercapai
-	Jumlah Jasa Tenaga Kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	orang/bulan				4	4				
-	Jumlah keikutsertaan dalam Karnaval batik	event				1					

**Tabel 2.8**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan**  
**Kota Pekalongan**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.595.306.000	1.023.052.000	1.026.280.000	1.202.050.000	1.042.872.000	1.499.186.092	898.824.651	977.567.837	1.165.490.970	988.120.597	0,94	0,88	0,95	0,97	0,95	1.177.912.000	1.105.838.029
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.221.800.000	1.773.984.000	997.304.000	971.220.000	537.178.000	2.201.863.567	1.725.250.209	963.935.577	952.327.062	526.574.898	0,99	0,97	0,97	0,98	0,98	1.300.297.200	1.273.990.263
Program peningkatan disiplin aparatur	230.000.000	96.500.000	127.550.000	121.300.000	125.000.000	229.225.000	96.160.000	127.550.000	119.980.000	124.057.700	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	140.070.000	139.394.540
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	0	71.150.000	75.000.000	0	49.800.000	0	71.150.000	75.000.000	0	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	39.230.000	39.190.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	91.250.000	38.150.000	35.000.000	35.000.000	18.500.000	90.305.500	21.503.000	33.444.200	33.615.000	18.287.000	0,99	0,56	0,96	0,96	0,99	43.580.000	39.430.940

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	230.042.000	113.562.000	124.028.000	120.967.000	126.560.000	227.042.000	108.394.480	124.016.000	120.945.400	125.937.876	0,99	0,95	1,00	1,00	1,00	143.031.800	141.267.151
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1.074.352.000	788.000.000	1.768.000.000	1.728.050.000	627.100.000	955.844.000	771.433.000	1.740.923.270	1.711.278.800	617.066.080	0,89	0,98	0,98	0,99	0,98	1.197.100.400	1.159.309.030
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	574.000.000	976.491.000	1.075.000.000	0	0	568.504.000	945.838.300	976.846.800	0	0	0,99	0,97	0,91	0,00	0,00	525.098.200	498.237.820
Pogram peningkatan pelayanan angkutan	465.300.000	212.500.000	394.550.000	651.633.000	773.810.000	462.124.000	207.000.000	389.644.000	636.176.000	772.641.500	0,99	0,97	0,99	0,98	1,00	499.558.600	493.517.100
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1.567.200.000	2.519.750.000	2.927.230.000	2.787.325.000	2.806.349.000	1.448.156.510	2.458.727.000	2.872.103.600	2.769.079.100	2.796.467.500	0,92	0,98	0,98	0,99	1,00	2.521.570.800	2.468.906.742
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	88.940.000	100.000.000	120.000.000	0	0	87.894.000	99.820.000	115.665.000	0	0	0,99	1,00	0,96	0,00	0,00	61.788.000	60.675.800

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perlintasan Sebidang	0	250.000.000	0	0	0	0	245.787.000	0	0	0	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	50.000.000	49.157.400

## 2.4. Tantangan dan Peluang

---

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Kota Pekalongan yang mana membutuhkan peningkatan pelayanan khususnya di bidang transportasi maka hal ini merupakan suatu tantangan dan sekaligus suatu peluang dalam pengembangan pelayanan transportasi baik bagi Dinas Perhubungan Kota Pekalongan maupun bagi *stakeholder* lainnya. Peluang dan tantangan dapat timbul baik di *Internal* maupun *external*.

Di bidang Lalu lintas, pengendalian dan penindakan kendaraan dengan muatan melebihi batas angkut muatan maupun melebihi dimensi yang sudah ditetapkan menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Perhubungan Kota Pekalongan. Namun adanya dukungan aturan dari Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terkait *Over Dimension Over Loading (ODOL)*, menjadi peluang bagi Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dalam penegakan hukum yang berhubungan dengan *Over Dimension Over Loading (ODOL)*, dengan bekerjasama dengan Polri dan Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan.

Tantangan lainnya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan angkutan perkotaan yang aman, nyaman dan selamat, baik untuk jarak dekat maupun jarak jauh. Rendahnya minat masyarakat menggunakan Angkutan Kota juga menjadi tantangan bagi Dinas Perhubungan. Hal tersebut disebabkan antara lain karena sarana angkutan kota yang jauh dari kata nyaman karena rata-rata usia kendaraan angkutan kota di Kota Pekalongan lebih dari 15 tahun. Selain itu maraknya Angkutan Sewa Khusus seperti Ojek Online baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) yang keberadaannya secara tidak langsung mempengaruhi kelangsungan angkutan kota, mengingat banyaknya penumpang angkutan kota yang beralih ke Angkutan Sewa Khusus tersebut dan membuat angkutan kota menjadi hidup segan mati tak mau.

Namun hal tersebut juga menjadi peluang tersendiri bagi Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, antara lain dengan mengembangkan sarana angkutan kota gratis bagi pelajar di Kota Pekalongan, atau dapat pula dengan memfungsikan angkutan kota dengan sistem sewa antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pengusaha/pengelola angkutan kota di Kota Pekalongan. Dinas Perhubungan dapat pula menambah jalur-jalur trayek baru yang belum

terjamah oleh angkutan kota, sebagai upaya pemerataan pelayanan transportasi kepada masyarakat.

Kemacetan lalu lintas juga menjadi tantangan bagi Dinas Perhubungan Kota Pekalongan. hal tersebut disebabkan antara lain oleh pertumbuhan kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan di kota Pekalongan. Banyaknya hambatan samping di jalan-jalan perkotaan yang disebabkan oleh penataan parkir kendaraan yang tidak teratur dan alih fungsi penggunaan badan jalan oleh PK-5 yang menjadikan badan jalan semakin sempit dan menyebabkan kemacetan.

Tantangan atas kondisi tersebut perlu ditindaklanjuti sesegera mungkin, karena Kota Pekalongan juga merupakan pusat perekonomian bagi daerah sekitar seperti, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Kota Pekalongan juga merupakan daerah tujuan wisata belanja dan wisata ziarah bagi para pelancong dari luar kota maupun mancanegara. Hal tersebut menjadi peluang tersendiri bagi Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dengan melaksanakan Rekayasa Lalu lintas untuk mengurangi atau membagi volume/beban jalan yang kepadatan lebih dan rawan macet ke jalan-jalan yang tingkat kepadatannya sedikit, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik unsur pemerintah, aparat penegak hukum, swasta dan elemen masyarakat dengan tetap mempertimbangkan unsur-unsur keselamatan dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Tantangan dari internal antara lain masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompotensi di Dinas Perhubungan. Baik Kompetensi Transportasi, Teknologi Informasi maupun Administrasi dan Keuangan. Hal tersebut dapat disiasati dengan peluang Peningkatan SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

Hasil analisis Peluang dan Tantangan baik Internal maupun External dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.9**  
**Tantangan dan Peluang**  
**Dinas Perhubungan Kota Pekalongan**

NO	PELUANG	TANTANGAN
(1)	(2)	(3)
1	adanya pengembangan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas dan prasarana jalan khususnya ATCS ( <i>Area Traffic Control System</i> )	masih adanya simpang-simpang rawan kemacetan lalu lintas akibat dampak pertumbuhan kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan dan belum terkoordinasi dengan ATCS ( <i>Area Traffic Control System</i> ).
2	Dukungan kebijakan dan fasilitasi hibah (baik pendanaan maupun Barang Milik Negara) dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah untuk mengembangkan penataan transportasi di Kota Pekalongan	Belum optimalnya jumlah sarana dan prasarana perlengkapan jalan di Kota Pekalongan seperti, marka, rambu jalan, RPPJ, cermin tikungan, guardrail dan lampu penerangan jalan umum, dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki.
3	Tingginya minat dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Forum LLAJ upaya pembangunan dan penataan transportasi di Kota Pekalongan	Masih rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan Angkutan umum perkotaan.
4	Bertambahnya SDM yang berkompetensi transportasi hasil kerjasama Pola Pembibitan dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi.	Tingkat disiplin pengguna jalan yang masih perlu ditingkatkan, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah mental dari pengguna jalan dan kurangnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas;

# **BAB III | PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKALONGAN**

## **3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan**

---

Identifikasi merupakan faktor-faktor penentu keberhasilan daerah dengan mengkaji lingkungan yang meliputi kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, karena lingkungan internal maupun eksternal dapat di kendalikan maupun tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Dinas Perhubungan dalam melaksanakan fungsi pemerintah maupun pembangunan, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan penyusunan rencana program dan kegiatan, maka perlu adanya rumusan permasalahan yang akurat dan jelas sesuai dengan potensi-potensi yang ada. permasalahan-permasalahan perlu juga dicantumkan agar terjadi kesinambungan rencana program atau kegiatan, karena pada dasarnya program atau kegiatan adalah pemecahan masalah yang sedang atau akan dihadapi melalui optimalisasi potensi yang dimiliki.

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Perhubungan pada Bab II, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel T-B. 3.5**  
**Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran**  
**Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya layanan transportasi perkotaan	belum optimalnya kapasitas jalan perkotaan	tingginya volume kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan
			belum optimalnya kuantitas fasilitas perlengkapan jalan
			belum optimalnya ketertiban lalu lintas dan penataan parkir di kawasan strategis
			belum optimalnya kualitas pelayanan angkutan umum
			belum optimalnya pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor
2	belum optimalnya kualitas pelayanan publik	belum optimalnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	belum optimalnya Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
			kurang optimalnya kompetensi SDM yang ada

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota

#### Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan

dilaksanakan selama lima tahun kedepan, sesuai dengan periode kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan, yang tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021–2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2021–2026. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021–2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Kota Pekalongan tahun 2021–2026, adalah :

**“Mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih Sejahtera,  
Mandiri dan Religius”**

Visi tersebut dibangun dengan ruh perwujudan Tahta Untuk Rakyat sebagaimana falsafah pemerintahan yang dibangun oleh Sultan Hamengku Buwono IX. Dalam kerangka RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, falsafah Tahta Untuk Rakyat ini mengandung makna bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kekuasaan dalam pemerintahan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemanfaatan seluruh rakyat Kota Pekalongan.

**Lebih Sejahtera**

Kota Sejahtera dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang adalah Kota yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (lahir dan batin) secara adil dan merata. Kota sejahtera menekankan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi dan terus bertumbuh, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipasi pemuda dan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan. Dengan kondisi yang lebih sejahtera ini, maka akan terpenuhi seluruh kebutuhan sosial dasar bagi seluruh warganya, sehingga akan dapat hidup secara bermartabat.

**Lebih Mandiri**

Sejalan dengan pemahaman kondisi kesejahteraan dari akhir periode pentahapan pembangunan lima tahunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD diatas, maka kondisi kemandirian Kota Pekalongan juga akan diambil dari definisi yang ada dalam RPJPD Kota Pekalongan tahun 2021-2026.

Di dalam RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa kemandirian masih mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat. Guna membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi melalui daya saing yang menjadi kunci kemandirian. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik maupun sosial budaya dan ini tercermin dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan Kota Pekalongan; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah yang semakin kokoh serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya. Gambaran ini merangkum sebuah kondisi kemandirian pada segala aspek kehidupan.

### **Lebih Religius**

Kondisi religius tidak menjadi gambaran akhir visi periode RPJP-D Kota Pekalongan tahun 2005-2025. Namun, upaya untuk mewujudkan kehidupan yang religius ini tercermin dari Misi kesatu RPJP-D yaitu Mewujudkan kondisi perikehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang **agamis**, berbudaya, bersih, aman, tertib dan demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam uraian penjabarannya disebutkan bahwa Agama menjadi landasan utama dalam semua perikehidupan, sehingga mampu menghasilkan persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat yang bersih, termanifestasi dalam tingkat keimanan dan ketaqwaan yang tinggi. penghargaan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepatuhan terhadap nilai budaya, moral, etika, hukum, dan HAM, menjunjung tinggi eksistensi perbedaan dan kemajemukan, pengembangan keterbukaan dan demokratisasi politik lokal.

Sejalan dengan gambaran di atas, maka kondisi lebih religius dimaknai bahwa nilai-nilai keagamaan akan menjadi dasar dan corak dari seluruh tujuan kota. Selanjutnya, secara terukur kemandirian ini akan digambarkan

sebagai suatu kondisi tatanan masyarakat Kota Pekalongan yang berakhlaqul karimah, hidup rukun, dan berkarakter

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, dirumuskan 7 (tujuh) misi yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Ketujuh misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan.
3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman.
4. Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan.
5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal.
6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah.
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Governmen*.

Dinas Perhubungan Kota Pekalongan merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan. Misi Walikota dan Wakil Walikota yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekalongan adalah pada misi ke 4 (empat) yaitu “Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan” dan pada misi ke 7 (tujuh) yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Governmen*”.

Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, melalui penetapan Tujuan dan Sasaran Pembangunan urusan Perhubungan sebagai ukuran keberhasilan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

#### A. Renstra Kementerian Perhubungan

Berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis Kementerian Perhubungan, yaitu :

1. Terwujudnya Konektivitas Nasional;
2. Meningkatnya Kinerja Layanan Perhubungan; dan
3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi.

Dari ketiga sasaran tersebut, terdapat 1 Sasaran Strategis yang selaras dengan arah pembangunan yang akan dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dalam lima tahun kedepan yaitu Sasaran Strategis ke 2 (Dua), Meningkatnya Kinerja Layanan Perhubungan.

Adapun faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorongnya disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan**

No	Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan	Permasalahan pada Dinas Perhubungan Kota Pekalongan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kinerja Layanan Perhubungan	Belum Optimalnya Layanan Transportasi Perkotaan	Tingginya volume kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan	Adanya kebijakan pemberlakuan Sistem Satu Arah di beberapa ruas jalan kota yang mempunyai tingkat kepadatan tinggi

No	Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan	Permasalahan pada Dinas Perhubungan Kota Pekalongan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Beberapa simpang di jalan kota sudah terkoordinasi dengan <i>Area Traffic Control System (ATCS)</i> , sehingga mempermudah penguraian kemacetan di ruas jalan kota
				Adanya koordinasi antar <i>stakeholder</i> terkait solusi permasalahan transportasi di Kota Pekalongan
			Belum optimalnya kualitas pelayanan angkutan umum	Rencana pembangunan Terminal Tipe C masuk dalam prioritas pembangunan Kota Pekalongan
				Kota Pekalongan sudah memiliki <i>Grand Design</i> Angkutan Perkotaan
			Kurang optimalnya ketertiban lalu lintas dan pengelolaan parkir di kawasan strategis.	penertiban lalu lintas dan pengelolaan parkir di kawasan strategis yang melibatkan unsur Penegak Hukum

## B. Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah terdapat 3 (tiga) Sasaran Jangka menengah yaitu :

1. Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi;
2. Meningkatnya ketersediaan fasilitas transportasi; dan
3. Meningkatnya kualitas angkutan umum Aglomerasi.

Dari ketiga sasaran tersebut, terdapat 1 (satu) sasaran yang selaras dengan sasaran pembangunan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan 5 (lima) tahun kedepan yaitu sasaran ke-2 “Meningkatnya ketersediaan fasilitas transportasi”.

Adapun faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorongnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2**  
**Sasaran Strategis Dinas Perhubungan**  
**Provinsi Jawa Tengah**

No	Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan pada Dinas Perhubungan Kota Pekalongan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Transportasi	Belum Optimalnya Layanan Transportasi Perkotaan	Belum optimalnya pemenuhan perlengkapan jalan (Marka, Rambu, Guardrail, RPPJ, Barrier, Lampu PJU) dikarenakan Keterbatasan APBD Kota Pekalongan	Pemenuhan perlengkapan jalan (Marka, Rambu, Guardrail, RPPJ, Barrier, Lampu PJU) dengan alternatif pembiayaan melalui APBN maupun APBD Provinsi Jateng

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

#### Strategis

Selanjutnya tabel dibawah ini akan menggambarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

## A. Rencana Tata Ruang Wilayah

**Tabel 3.3**  
**Rencana Tata Ruang Wilayah**  
**Dinas Perhubungan Kota Pekalongan**

No	Program Rencana Tata Ruang Wilayah	Permasalahan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Perwujudan Sistem Prasarana Kota</b>				
1.	Pembangunan dan Pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C	Belum Optimalnya Layanan Transportasi Perkotaan	Adanya tumpang tindih kewenangan dikarenakan dilokasi rencana pembangunan Terminal Tipe C tersebut juga dilewati trayek Angkutan AKDP	DED Pembangunan Terminal Tipe C sudah tersedia adanya rencana penataan ulang rute angkutan kota
2.	Pembangunan dan Pemeliharaan Terminal Barang	belum tersedianya kajian terminal barang	rencana lokasi belum di tentukan	pembangunan terminal barang sudah masuk dalam prioritas pembangunan kota pekalongan

## B. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

**Tabel 3.4**  
**Kajian Lingkungan Hidup Strategis**  
**Dinas Perhubungan Kota Pekalongan**

No	Sasaran Strategis KLHS	Permasalahan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan penggunaan transportasi umum	menurunnya jumlah angkutan kota yang beroperasi di Kota Pekalongan	Pertumbuhan Kendaraan yang cukup tinggi	adanya potensi wisata baru di kota pekalongan
			Menurunnya faktor muat angkutan umum	tingginya angka kemacetan dan beban jalan

			rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum	dilakukannya evaluasi dan penataan jaringan trayek
--	--	--	--	--

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Setelah mengamati gambaran pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan lima tahun terakhir, menelaah sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perhubungan, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, implikasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis dapat diketahui isu-isu strategis pada lima tahun kedepan di bidang perhubungan.

Isu isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Pekalongan ke depan yaitu :

1. Tingginya volume kendaraan tidak sebanding dengan kapasitas jalan;
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan angkutan umum;
3. Kurang optimalnya ketertiban lalu lintas dan pengelolaan parkir di kawasan strategis;
4. Belum optimalnya pemenuhan perlengkapan jalan (Marka, Rambu, Guardrail, RPPJ, Barrier, Lampu PJU) dikarenakan Keterbatasan APBD Kota Pekalongan;
5. Adanya tumpang tindih kewenangan dikarenakan dilokasi rencana pembangunan Terminal Tipe C tersebut juga dilewati trayek Angkutan AKDP;
6. Rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum.

## BAB IV | TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Pekalongan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah pernyataan- pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Layanan Transportasi Perkotaan		Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)	B	B	B	B	B
		Meningkatnya Kapasitas Jalan Perkotaan	Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A	28%	28%	28%	28%	28%
2.	Meningkatkan		Indeks					

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
	Kualitas Layanan Publik		Kepuasan Masyarakat					
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD					

**4.4.1. Kondisi Demografi**

**4.4.2. Kondisi Ekonomi**

**4.2. Data Transportasi Jalan**

---

## **BAB V | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Faktor faktor kunci keberhasilan adalah unsur-unsur dari suatu organisasi yang menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi organisasi. Faktor faktor kunci keberhasilan merupakan hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur-unsur perencanaan strategis. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi.

Arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>VISI : Mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius</b>			
<b>MISI IV : Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	Meningkatkan Layanan Transportasi Perkotaan	Meningkatkan Layanan Transportasi Perkotaan	Pemenuhan dan pengoptimalan Sarana dan Prasarana Perhubungan
			Peningkatan capaian Kinerja Lalu lintas
			Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala
<b>MISI VII : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Governance</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Mutu dan Kualitas Laporan Capaian Kinerja Dinas Perhubungan
			Peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur Dinas Perhubungan
			Peningkatan Mutu dan Kualitas pengadaan/ pemeliharaan Barang Milik Daerah

## **BAB VI | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah sebuah Instrumen Kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang berorientasi pada hasil dan dampak positif untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Program dan Kegiatan juga sebagai wujud implementasi dari Strategi dan Arah Kebijakan untuk perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.

Program Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dalam Rencana Strategis 2021-2026 adalah :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan; dan
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan yang selaras dengan Tujuan dan Sasaran diuraikan dalam Tabel 6.1 sebagai berikut :

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan**  
**Dinas Perhubungan Kota Pekalongan**

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	
Meningkatkan Layanan Transportasi Perkotaan			Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)		B		B		B		B		B		B			Kota Pekalongan
	Meningkatnya Kapasitas Jalan Perkotaan		Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A		28	6.882.248.000	28	8.292.373.000	28	8.279.617.000	28	7.608.296.000	28	7.719.891.000	28	38.782.425.000		Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketersediaan fasilitas LLAJ		89	2.467.178.000	92	3.745.385.000	95	3.981.005.000	97	3.365.179.000	100	3.416.067.000	100	16.974.814.000	Kota Pekalongan
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan		5	2.452.178.000	5	3.640.385.000	5	3.276.005.000	5	3.335.179.000	5	3.316.067.000	5	16.019.814.000	Kota Pekalongan
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum		147	485.178.000	147	669.685.000	147	611.305.000	147	519.179.000	147	147.500.000	735	2.432.847.000	Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	
		Kabupaten /Kota	bermeterisasi															
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	Jumlah APILL yang terpasang		1	612.000.000	1	1.456.700.000	0	1.150.700.000	0	1.302.000.000	0	1.302.067.000	2	5.823.467.000	Kota Pekalongan	
			Jumlah Lampu Flashing yang terpasang		4	117.700.000	4	117.700.000	4	117.700.000	4	117.700.000	4	117.700.000	20	588.500.000	Kota Pekalongan	
			Jumlah Panjang Pengecatan Marka Jalan		7600	202.000.000	7600	202.000.000	7600	202.000.000	7600	202.000.000	7600	202.000.000	38000	1.010.000.000	Kota Pekalongan	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)
			Jumlah Rambu yang terpasang		22	100.000.000	22	100.000.000	22	100.000.000	22	100.000.000	22	100.000.000	110	500.000.000	Kota Pekalongan
			APILL ATCS yang terpasang		1	410.000.000	1	600.000.000	1	500.000.000	0	0	1	699.367.000	5	2.209.367.000	Kota Pekalongan
			Jumlah VMS yang terpasang		0	0	0	0	0	0	1	1.000.000.000	0	0	5	1.000.000.000	Kota Pekalongan
			Jumlah Vehicle Detector ATCS yang terpasang		0	0	1	182.000.000	1	181.000.000	0	0	1	183.000.000	10	546.000.000	Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Bulan pemeliharaan rutin/ berkala penerangan jalan umum		12	396.000.000	12	346.000.000	12	346.000.000	12	346.000.000	12	346.000.000	12	1.780.000.000	Kota Pekalongan
			Jumlah lampu penerangan jalan umum diganti LED		84	442.000.000	100	676.000.000	100	676.000.000	100	676.000.000	100	676.000.000	484	3.146.000.000	Kota Pekalongan
			Tenaga Teknis PJU		96	192.000.000	96	192.000.000	96	192.000.000	96	192.000.000	96	192.000.000	96	960.000.000	Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)
		Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah bulan pemeliharaan rambu dan instalasi lalu lintas		12	325.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	1.525.000.000	Kota Pekalongan
		<b>Pengelolaan Terminal Tipe C</b>	<b>Jumlah Pengelolaan Terminal Tipe C</b>			<b>15.000.000</b>		<b>105.000.000</b>		<b>705.000.000</b>		<b>30.000.000</b>		<b>30.000.000</b>		<b>835.000.000</b>	Kota Pekalongan
		Penyusunan Rencana pembangunan Terminal Tipe C	Penyusunan Dokumen Kelengkapan Pembangunan		1	15.000.000	1	105.000.000	2	705.000.000	1	30.000.000	1	100.000.000	3	955.000.000	Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	
			Terminal Tipe C															
		Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Terminal Tipe C yang terbangun		0		0		1	500.000.000	0		0		1	500.000.000		Kota Pekalongan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Halte yang terpelihara		1	15.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	100.000.000	9	205.000.000		Kota Pekalongan
			<b>Kinerja Lalu Lintas</b>		<b>0,4</b>	<b>3.421.279.000</b>	<b>0,44</b>	<b>3.572.038.000</b>	<b>0,44</b>	<b>3.564.956.000</b>	<b>0,44</b>	<b>3.514.846.000</b>	<b>0,44</b>	<b>3.558.176.000</b>	<b>0,44</b>	<b>17.631.295.000</b>		Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	
			Kab/ Kota (IKK Outcome)															
		Penetapan Rencana Jaringan Induk LLAJ Kabupaten / Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan Penetapan Rencana Jaringan Induk LLAJ		100	62.000.000	100	62.000.000	100	62.000.000	100	62.000.000	100	65.000.000	100	313.000.000		Kota Pekalongan
		Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Jumlah Dokumen Survey yang disusun		2	62.000.000	2	62.000.000	2	62.000.000	2	62.000.000	2	65.000.000	10	313.000.000		Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	
		Kabupaten/Kota																
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Pembinaan dan pengawasan Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		180	381.000.000	180	431.087.000	180	410.000.000	180	410.000.000	180	400.000.000	180	2.032.087.000		Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan penerbitan izin penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan juru parkir		12	250.000.000	12	270.000.000	12	280.000.000	12	280.000.000	12	300.000.000	12	1.380.000.000	Kota Pekalongan
			Jumlah Kajian		0	0	0	0	1	55.000.000	1	55.000.000	0	0	5	55.000.000	Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	
			Potensi Parkir															
			Pengadaan CCTV Parkir		0	0	0	0	3	75.000.000	3	75.000.000	4	100.000.000	12	250.000.000	Kota Pekalongan	
			Pengadaan Kantong Parkir		1	131.000.000	1	161.087.000	0	0	0	0	0	0	1	292.087.000	Kota Pekalongan	
		<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan</b>	<b>Persentase pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk</b>		<b>92</b>	<b>2.932.779.000</b>	<b>92</b>	<b>2.948.451.000</b>	<b>92</b>	<b>2.965.956.000</b>	<b>92</b>	<b>2.930.846.000</b>	<b>92</b>	<b>2.956.176.000</b>	<b>98</b>	<b>14.734.208.000</b>	Kota Pekalongan	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	
		<b>Kabupaten / Kota</b>	<b>jaringan jalan</b>															
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah bulan fasilitasi operasional ATCS		12	164.328.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	187.395.000	12	200.000.000	12	951.723.000	Kota Pekalongan	
			Tenaga Operator ATCS		120	240.000.000	120	240.000.000	120	240.000.000	120	240.000.000	120	240.000.000	120	1.200.000.000	Kota Pekalongan	
		Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan	Jumlah peserta sosialisasi dan		110	20.000.000	110	20.000.000	110	20.000.000	110	20.000.000	110	20.000.000	550	100.000.000	Kota Pekalongan	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	
		n Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	pemilihan pemuda pelopor lalu lintas															
			Jumlah Peserta lomba PKS		10	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	10	60.000.000		Kota Pekalongan
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas pelaksanaan	Jumlah Kegiatan Pengamanan rutin dan insidental		300	194.751.000	300	194.751.000	300	194.751.000	300	194.751.000	300	202.476.000	300	981.480.000		Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	
		n Kebijakan untuk jalan Kabupaten/ Kota																
			Jumlah Kegiatan Pengawasan		26	18.800.000	26	18.800.000	26	18.800.000	26	18.800.000	26	18.800.000	26	94.000.000		Kota Pekalongan
			Jumlah honor petugas Lalu Lintas		552	1.104.000.000	552	1.104.000.000	552	1.104.000.000	552	1.104.000.000	552	1.104.000.000	492	5.520.000.000		Kota Pekalongan
			Jumlah Kegiatan operasi Laik Jalan Kendaraan Bermotor		40	80.000.000	40	80.000.000	40	80.000.000	40	80.000.000	40	80.000.000	40	400.000.000		Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)
			Jumlah kegiatan pengamanan Lebaran, Natal dan Tahun Baru		3	236.900.000	3	236.900.000	3	236.900.000	3	236.900.000	3	236.900.000	3	1.184.500.000	Kota Pekalongan
			Jumlah Perlintasan Sebidang yang dipelihara		4	40.000.000	4	20.000.000	4	37.505.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	137.505.000	Kota Pekalongan
			Jumlah tenaga operasional perlintasan sebidang		396	792.000.000	396	792.000.000	396	792.000.000	396	792.000.000	396	792.000.000	396	3.960.000.000	Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan ForumLLAJ		4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	3	25.000.000	4	30.000.000	25	145.000.000	Kota Pekalongan
		Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten / Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)		83	15.500.000	83	15.500.000	83	15.000.000	83	15.000.000	83	15.000.000	83	76.000.000	Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)
		Koordinasi dan Sinkronisasi penilaian hasil Andalalin	Jumlah Kegiatan fasilitasi penilaian Andalalin		6	15.500.000	6	15.500.000	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	30	<b>76.000.000</b>	Kota Pekalongan
		<b>Audit Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>Jumlah Kegiatan Audit Inspeksi Keselamatan LLAJ yang dilaksanakan</b>		2	<b>30.000.000</b>	2	<b>47.000.000</b>	2	<b>47.000.000</b>	2	<b>47.000.000</b>	2	<b>17.000.000</b>	2	<b>188.000.000</b>	Kota Pekalongan
		Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur	Jumlah SDM tenaga LLAJ yang		0	0	75	17.000.000	75	17.000.000	75	17.000.000	75	17.000.000	75	68.000.000	Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	
		LLAJ	dibina															
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	Jumlah awak angkutan umum yang dibina dan diseleksi		30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30	100.000.000		Kota Pekalongan
		Pelaksanaan	Jumlah		20	6.000.000	20	6.000.000	20	6.000.000	20	6.000.000	20	6.000.000	40	30.000.000		Kota

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	
		n Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	pengusaha angkutan umum yang dibina															Pekalongan
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang	Jumlah jenis Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau		1	0	3	68.000.000	3	65.000.000	3	50.000.000	3	75.000.000	3	258.000.000		Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	
		antar Kota dala 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Barang antar Kota dala 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang difasilitasi															
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1	Jumlah Perjalanan Bus Sekolah		0	0	0	0	200	25.000.000	200	25.000.000	200	25.000.000	2.000	75.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	
		(satu) Daerah Kabupaten/ Kota																
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1	Jumlah armada becak yang difasilitasi dan dibina		0	0	100	46.000.000	80	40.000.000	0	0	110	50.000.000	500	136.000.000		Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	
		(satu) Kabupaten/ Kota																
			Jumlah Angkutan Kota Yang difasilitasi		0	0	73	22.000.000	0	0	73	25.000.000	0	0	73	47.000.000		
			Persentase Peningkatan jumlah Kendaraan Wajib Uji (KBWU)		0,76	999.791.000	0,75	974.950.000	0,75	733.656.000	0,74	728.271.000	0,74	745.648.000	0,74	4.182.316.000		Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	
			yang melaksanakan uji berkala															
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase pelaksanaan pelayanan uji berkala (IKK Output)		65,33	999.791.000	65,26	974.950.000	65,19	733.656.000	65,12	728.271.000	65,06	745.648.000	94,1	4.182.316.000	Kota Pekalongan	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Uji yang diadakan		2	710.791.000	1	685.950.000	1	444.656.000	1	439.271.000	1	456.648.000	7	2.737.316.000	Kota Pekalongan	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah tanda bukti lulus uji yang diadakan		6500	170.000.000	6500	170.000.000	6500	170.00.000	6500	170.000.000	6500	170.000.000	32.450	680.000.000	Kota Pekalongan
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji yang dipelihara dan dikalibrasi		9	65.000.000	9	65.000.000	9	65.000.000	9	65.000.000	9	65.000.000	9	325.000.000	Kota Pekalongan
			Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor		12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	12	120.000.000	Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)
			Perawatan Aplikasi		1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	75.000.000	Kota Pekalongan
		Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kunjungan Pembinaan usaha perbengkelan		20	15.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	20	75.000.000	Kota Pekalongan
<b>Meningkatkan Kualitas Layanan Publik</b>			<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>			<b>20.959.836.000</b>		<b>19.416.202.000</b>		<b>20.804.639.000</b>		<b>19.420.311.000</b>		<b>20.041.387.000</b>		<b>100.642.375.000</b>	Kota Pekalongan
	<b>Meningkatnya Akuntabilitas</b>		<b>Nilai SAKIP OPD</b>			<b>20.959.836.000</b>		<b>19.416.202.000</b>		<b>20.804.639.000</b>		<b>19.420.311.000</b>		<b>20.041.387.000</b>		<b>100.642.375.000</b>	Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	
	<b>Kinerja Perangkat Daerah</b>																	
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja		100	5.291.478.000	100	5.264.769.000	100	5.294.934.000	100	5.345.088.000	100	5.535.092.000	100	26.731.361.000		Kota Pekalongan
		Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi		100	21.500.000	100	21.500.000	100	21.500.000	100	21.500.000	100	21.500.000	100	107.500.000		Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	
			Kinerja Perangkat Daerah															
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun		2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	15.000.000		Kota Pekalongan
			Jumlah Dokumen Renstra perangkat daerah yang disusun		0	0	0	0	0	0	1	8.000.000	0	0	1	8.000.000		Kota Pekalongan
		Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah dokumen RKA dan		2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	12.500.000		Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	
		Dokumen RKA-SKPD	perubahan RKA yang disusun															
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun		4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	15.000.000		Kota Pekalongan
			Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun		2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	12.500.000		Kota Pekalongan
			Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun		3	5.500.000	3	5.500.000	3	5.500.000	3	5.500.000	3	5.500.000	12	27.500.000		Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	
			(LPPD,LK PJ,LKJIP)															
			Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun		5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	25.000.000		Kota Pekalongan
		Administrasi Keuangan Perangkat	persentase ketersediaan layanan		100	5.269.978.000	100	5.243.269.000	100	5.273.434.000	100	5.315.588.000	100	5.513.592.000	100	26.615.861.000		Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	
		Daerah	administrasi kepegawainan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah															
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12	5.181.978.000	12	5.155.269.000	12	5.185.434.000	12	5.227.588.000	12	5.425.592.000	12	26.175.861.000		Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan		12	86.000.000	12	86.000.000	12	86.000.000	12	86.000.000	12	86.000.000	12	430.000.000	Kota Pekalongan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun		1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	1.000.000	Kota Pekalongan
			Persentase ketersediaan		100	14.954.326.000	100	13.403.790.000	100	13.297.202.000	100	13.058.336.000	100	13.474.031.000	100	72.854.185.000	Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	
			layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah															
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian		100	149.500.000	100	10.000.000	100	150.000.000	100	10.000.000	100	160.000.000	100	479.500.000		Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	
			perangkat daerah															
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota		2	9.500.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	49.500.000		Kota Pekalongan
			Jumlah pakaian dinas yang diadakan		140	140.000.000	0	0	140	140.000.000	0	0	150	150.000.000	420	430.000.000		Kota Pekalongan
		Administrasi umum perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi umum		100	683.500.000	100	683.500.000	100	657.500.000	100	672.500.000	100	672.500.000	100	3.369.500.000		Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	
			<b>perangkat daerah</b>															
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	25.000.000	Kota Pekalongan	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos		12	30.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	89.935.000	Kota Pekalongan	
			Jumlah peralatan		7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	50	250.000.000	Kota Pekalongan	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	
			dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan															
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga		12	6.000.000	12	7.500.000	12	7.500.000	12	7.500.000	12	7.500.000	12	36.000.000		Kota Pekalongan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman		12	300.000.000	12	310.000.000	12	325.000.000	12	325.000.000	12	325.000.000	12	1.585.000.000		Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	100.000.000	Kota Pekalongan
			Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelola		12	170.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	770.000.000	Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	
			n pendapatan															
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan		12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	12.500.000		Kota Pekalongan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah fasilitas rapat konsultasi dan		100	100.000.000	100	87.500.000	100	87.500.000	100	87.500.000	100	87.500.000	100	450.000.000		Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	
		SKPD	koordinasi luar daerah															
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	14.121.326.000	100	12.736.290.000	100	12.474.702.000	100	12.375.836.000	100	12.641.531.000	100	64.349.685.000		Kota Pekalongan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat		12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	10.000.000		Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12	13.798.326.000	12	12.418.290.000	12	12.151.702.000	12	12.052.836.000	12	12.318.531.000	12	62.739.685.000	Kota Pekalongan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor		12	90.000.000	12	85.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	445.000.000	Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)
			Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah berdasarkan SK Walikota		7	231.000.000	7	231.000.000	7	231.000.000	7	231.000.000	7	231.000.000	7	1.155.000.000	Kota Pekalongan
			Persentase pengadaan / pemeliharaan Barang Milik Daerah		100	714.032.000	100	747.643.000	100	2.212.503.000	100	1.016.887.000	100	1.032.264.000	100	9.397.730.000	Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100	24.000.000	100	37.643.000	100	40.000.000	100	41.000.000	100	41.000.000	100	205.000.000	Kota Pekalongan
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Bulan Monev Aset Dinas Perhubungan		12	24.000.000	12	37.643.000	12	40.000.000	12	41.000.000	12	41.000.000	12	184.643.000	Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	0	0	0	100	4.087.509.000	100	497.661.000	0	0	100	4.735.420.000	Kota Pekalongan
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan		0	0	0	0	1	1.362.503.000	1	165.887.000	0	0	9	1.528.390.000	Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	690.032.000	100	710.000.000	100	810.000.000	100	810.000.000	100	991.264.000	100	4.011.296.000	Kota Pekalongan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin berkala		32	270.032.000	32	270.000.000	32	270.000.000	32	270.000.000	32	270.000.000	32	1.350.032.000	Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	
		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala		3	380.000.000	3	400.000.000	3	500.000.000	3	600.000.000	3	681.264.000	3	2.561.264.000		Kota Pekalongan
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala		12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	200.000.000		Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	
		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	a peralatan dan perlengkapan gedung kantor															

## **BAB VII | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN**

Untuk mengukur sebuah keberhasilan kinerja, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja sebagai gambaran tentang ukuran kinerja yang akan dicapai melalui Program (outcome) setiap tahunnya dan pencapaian pada akhir tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Secara teknis, Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dirumuskan dengan mengambil Indikator dari Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang sudah ditetapkan. Adapun rincian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Pekalongan tahun 2021-2026 beserta target dan capaiannya tertuang dalam tabel 7.1 berikut ini :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Perhubungan**  
**Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Kapasitas Jalan Perkotaan	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah								

## **BAB VIII | PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pekalongan tahun 2021-2026 disusun sebagai Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan, dengan maksud untuk dijadikan pedoman, penentu arah sasaran dan tujuan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pekalongan tahun 2021-2026 telah melalui proses pembahasan dengan BAPPEDA Kota Pekalongan dengan melibatkan unsur-unsur terkait yang diwadahi dalam Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan untuk mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat.

Tindak lanjut dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pekalongan tahun 2021-2026 ini antara lain :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pekalongan;
2. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah urusan Perhubungan yang sinergis, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan ketersediaan Sumber Daya yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan.